



**KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SUB SEKTOR
PETERNAKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN LUWU**

**OLEH
A H M A D**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada
Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin*

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001**

Judul Skripsi : Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor
Peternakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Luwu.

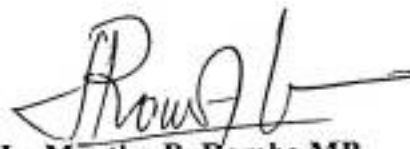
Nama : AHMAD

No. Pokok : 1311 95 085

Skripsi ini Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :



Ir. Abdul Hamid Hoddi, MS
Pembimbing Utama



Ir. Martha B. Rombe, MP
Pembimbing Anggota

Diketahui Oleh :



Prof. Dr. Ir. MS. Effendi Abustam, M.S
Dekan



Ir. Muhammad Djufri Palli
Ketua Jurusan

Tanggal Lulus : Agustus 2001



ABSTRAK

AHMAD I 311 95 085. Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu. (Dibawah bimbingan Ir. Abdul Hamid Hoddi Selaku Pembimbing Utama dan Ir. Martha B.Rombe, MP Selaku Pembimbing Anggota.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu, selama dua bulan yaitu dari Bulan April sampai Juni 2001.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Instansi Peternakan untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di sektor peternakan

Dalam penelitian ini digunakan studi kasus (Case Studi) dimana data yang diperoleh berasal dari Kantor Dinas Peternakan berupa data populasi ternak dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi sub sektor peternakan, Kantor Dinas Pendapatan Daerah berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta Kantor Badan Pusat Statistik berupa data keadaan wilayah secara umum dan penduduk.

Untuk melihat besar kecilnya sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan maka digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \% \text{ (Asri,1991)}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir masih relatif kecil karena berada di bawah nilai rata-rata kontribusi

sub sektor lain, kecilnya kontribusi sub sektor peternakan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dan seringnya terjadi spekulasi dalam pemungutan pajak dan retribusi oleh petugas pajak di lapangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah, SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis, sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dengan senang hati penulis akan menerimanya.

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi, namun berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Ir. Abd. Hamid Hoddi, MS** sebagai Pembimbing Utama dan Ibu **Ir. Martha B. Rombe, Mp** sebagai Pembimbing Anggota atas bantuan dan nasehat, bimbingan serta petunjuk maupun motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
2. Bapak Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Luwu dan stafnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dan stafnya serta Kepala Biro Pusat Statistik Kabupaten Luwu dan stafnya yang telah membantu penulis dalam pengambilan atau pengumpulan data.

3. Secara khusus kepada Ibunda **Hamida** tercinta atas segala pengorbanan dan doa restu di dalam mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang serta kepada saudara-saudaraku **Arman, Ir. Armiadi** dan **Ir. Haidir** yang juga mempunyai andil yang besar dalam penyelesaian studi penulis.
4. Ucapan terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan semasa kuliah. Kepada “ **Wali, Iful, Nurdin, Saidin** “ dan semua pihak yang punya andil dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan , tak lupa diucapkan banyak terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat adanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Amin.

Makassar, Agustus 2001

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	2
Hipotesis	3
Tujuan Penelitian	3
Kegunaan Penelitian	3
TINJAUAN PUSTAKA	
Peternakan Secara Umum	4
Keuangan Pemerintah Daerah	5
Pajak	8
Retribusi	10

Pendapatan Asli Daerah	12
Pinjaman Daerah.....	14
METODOLOGI PENELITIAN	
Waktu dan Tempat Penelitian	16
Metode Pengumpulan Data	16
Analisa Data	16
Konsep Operasional	17
KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
Letak Geografis.....	18
Keadaan Penduduk	20
Tingkat Pendidikan	23
Mata Pencaharian	24
Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	25
Keadaan Peternakan	26
HASIL DAN PEMBAHASAN	
Perkembangan PAD di Kabupaten Luwu	28
Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan yang dikelola Kab.Luwu	29
Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan sebagai sumber PAD	31
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Sub	32
Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor.....	33

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 36

Saran 36

DAFTAR PUSTAKA..... 37

LAMPIRAN..... 39



DAFTAR TABEL

No.	<u>Teks</u>	Hal
1.	Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Luwu.....	19
2.	Jumlah Penduduk, Kepadatan, Jenis Kelamin dan Perbandingan Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut kecamatan di Kabupaten Luwu.....	21
3.	Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Luwu	23
4.	Jumlah Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Luwu	24
5.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan	25
6.	Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Luwu....	26
7.	Populasi Ternak di Kabupaten Luwu Tahun 2000.....	27
8.	Tarif Pajak Potong Hewan di Kabupaten Luwu	29
9.	Penerimaan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Luwu	31
10.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Luwu	32
11.	Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Luwu	33
12.	Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Total PAD di Kabupaten Luwu.....	34

DAFTAR GAMBAR

No.	<u>Teks</u>	Hal
1.	Populasi Ternak di Kabupaten Luwu Selama Lima Tahun Terakhir.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

No.	<u>Teks</u>	Hal
1.	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Luwu (1996 – 2000).....	39
2.	Jumlah Pemotongan Ternak di Kabupaten Luwu (1996 – 2000)	39
3.	Sarana dan Prasarana Penunjang.....	40
4.	Penerimaan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Luwu (1996 – 200).....	40
5.	Perhitungan Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Lain Terhadap Total Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu.....	41
6.	Perhitungan Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Total PAD di Kabupaten Luwu	54



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang menyeluruh diberbagai sektor, termasuk sektor peternakan sebagai salah satu bagian dari pertanian secara umum pada saat ini telah banyak memberikan peranan yang cukup besar kepada masyarakat baik sebagai pemenuhan kebutuhan gizi protein hewani maupun digunakan sebagai barang yang bernilai ekonomis yang diperjualbelikan untuk peningkatan pendapatan demi tercapainya tingkat kesejahteraan, peran yang cukup besar tersebut mendorong pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan sektor peternakan seiring dengan sektor lain sebagai sumber pendapatan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan itu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah

dengan berusaha menggarap dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah termasuk potensi sektor peternakan.

Pengembangan sektor peternakan di kabupaten Luwu dianggap cukup penting karena, selain sebagai kebutuhan masyarakat juga didukung oleh letaknya yang strategis ditinjau dari segi pemasaran, karena terletak pada jalur tran Sulawesi dengan lancarnya perhubungan yang memungkinkan dapat menjangkau kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Di samping itu kabupaten Luwu sebagai pintu gerbang daerah Sulawesi Selatan bagian utara yang menghubungkan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara, sehingga berfungsi sebagai sentra perekonomian di kawasan utara propinsi Sulawesi Selatan. Secara umum potensi peternakan yang ada di daerah ini adalah ternak kerbau, sapi, babi dan ayam buras. Potensi tersebut merupakan sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilihat seberapa besar pajak dan retribusi sektor peternakan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka di rumuskan masalah yaitu seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi sektor peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Luwu.



Hipotesis

Dari perumusan di atas, maka dapat diambil hipotesis yaitu diduga bahwa pajak dan retribusi sektor peternakan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumbangan pajak dan retribusi sektor peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Luwu.

Kegunaan Penelitian

Sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi pemerintah khususnya instansi peternakan guna lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di sektor peternakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Peternakan Secara Umum

Istilah "peternakan" dan "ternak" mengandung makna tertentu yang bersifat timbal balik antara dua sistem. Kegiatan yang mengolah ternak itulah disebut peternakan. Dalam kegiatan ini tersirat makna bisnis yang berorientasi pada pencapaian keuntungan. Ternyata pengolahan ini harus menurut aturan teknis dan hakekat dari bisnis. Dengan dasar inilah maka ternak harus memberikan keuntungan. Bentuk keuntungan itu berupa hasil produksi yang sangat diharapkan oleh peternak (Rasyaf, 1996).

Bisnis peternakan makin kompleks, menggunakan banyak peralatan yang canggih, inovasi teknologi, memerlukan banyak modal, tenaga kerja, prediksi pasar dan lain-lain. Atas dasar kekomplekan ini diperlukan kecakapan manajemen (Prawirokusumo, 1990).

Sastroamidjoyo (1990) menyatakan bahwa dari beberapa jenis ternak yang dipelihara oleh masyarakat tujuannya untuk keperluan tenaga kerja maupun untuk diambil dagingnya. Perkembangan populasi ternak sangat ditentukan oleh seberapa besar manfaat dan kepentingannya. Makin banyak manfaatnya bagi kehidupan masyarakat maka makin pesat perkembangannya. Sebaliknya makin kurang manfaatnya bagi masyarakat makin kurang perkembangannya.

Peternakan merupakan suatu kegiatan usaha yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kewiraswastaan pada aspek teknis beternak yang selaras

berlandaskan ilmu peternakan yang benar agar tujuan usaha dapat tercapai. Tentu saja tujuannya berupa tujuan komersil. Untuk mencapai tujuan ini peternak mengusahakan sumber daya yang ada, baik yang disewa maupun yang dibeli (Rasyaf, 1996).

Atas dasar tingkat jumlah produksi, macam teknologi yang dipakai, banyaknya hasil produksi yang dipasarkan maka macam usaha peternakan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu :

1. Usaha yang bersifat tradisional
2. Usaha yang bersifat backyard
3. Usaha komersil (Prawirokusumo, 1990).

Kustiah (1988), mengemukakan bahwa kenyataan yang kompleks dihadapi dalam pembangunan peternakan adalah sebagian masyarakatnya khususnya di Sulawesi Selatan dalam memelihara ternaknya hanya dilakukan sebagai usaha sampingan selain usaha pokoknya yaitu bertani, dengan demikian pola pemeliharaannya masih sangat sederhana.

Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah (Anonim,1999).

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan di daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan agar dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Waluyo,1997).

Anonim (1999) menyatakan, dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah daerah tingkat I dan II mengutip bayaran untuk layanan yang disediakan. Bagi Dati II pungutan merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, hampir menjadi setengah dari seluruh pendapatan daerah. Sebagian besar pendapatan ini digolongkan kedalam pungutan (retribusi) tetapi jumlah yang cukup besar juga dicatat dibawah penerimaan dari dinas (Devas, 1989).

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam



melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana atau uang (Kaho, 2001).

Prawiraamijaya (1984), menyatakan bahwa pendapatan pemerintah terbagi dalam :

1. Penghasilan pemerintah yang bersifat sama dengan pihak swasta dinamakan privat, misalnya penghasilan perusahaan negara.
2. Penghasilan yang tidak dapat dimiliki / diterima oleh swasta, misalnya pajak.
3. Retribusi adalah merupakan bagian pertama dan kedua diatas, misalnya penerimaan dari sekolah, lembaga-lembaga, karena ini biasa didirikan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta dapat juga mendirikannya. Jadi sifatnya negeri dan swasta.

Soedargo (1994) menyatakan, agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka dengan sendirinya kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan yang diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membiayai dan memajukan daerah, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Mardiasmo, 1997).

Sumber pembiayaan yang utama dan bersifat langgeng dalam mendukung pembangunan daerah adalah swadaya masyarakat atau tabungan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (Anonim, 1997).

Pamudji (1980) menyatakan, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Komaruddin (1988) menyatakan bahwa, anggaran belanja yaitu alat yang dapat menjadi sumber kemajuan ekonomi dan ini tergantung cara penggunaannya dan kebijaksanaan pemerintah setempat.

Pajak

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang - Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) untuk membiayai pengeluaran umum (publike uitgaren), dan yang digunakan sebagai alat pecegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan (Soemitro,1990).

Brotodihardjo (1989) menyatakan, pajak ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat - alat guna

membayai pengeluaran pemerintah tanpa memberikan sesuatu yang timbal balik yang langsung dinikmati sebagai balasannya.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Waluyo, 1997).

Bohari (1985) bahwa, pajak ialah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang membayar pajak menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi atas dua yaitu, (a) pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai; (b) pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yang terdiri atas pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II (Mardiasmo, 1997).

Menurut Kaho (2001), ciri mendasar pajak adalah : (a) pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-undang dan / atau peraturan hukum lainnya; (b) pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung

pengeluaran negara dan sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi (d) pajak disamping sebagai sumber keuangan negara (budgetain) juga berfungsi sebagai pengatur (regulair).

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam upaya perpajakan ini masing - masing adalah wajib pajak, struktur perekonomian masih perlu dipacu pelaksanaannya. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang belum selesai ditindak lanjuti. Kepala Daerah sebagai pucuk pimpinan pemerintah di daerah terus - menerus menanamkan kesadaran ini disegenap lapisan aparat di daerah dalam lingkungan masing - masing, yang akan tercermin melalui berbagai media kegiatan (Widjaya,1998).

Retribusi

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran - pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa - jasa negara, atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu (Soemitro,1990).

Waluyo (1997) menyatakan bahwa retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.



Retribusi adalah pemungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah (Kunarjo,1996).

Objek retribusi terdiri dari : (a) jasa umum, (b) jasa usaha, (c) perizinan tertentu. Sedangkan menurut penggolongannya : (a) retribusi jasa umum, (b) retribusi jasa usaha, dan (c) retribusi perizinan tertentu (Waluyo,1997).

Dalam kondisi sekarang ini sumber penerimaan yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan adalah penerimaan retribusi terutama di daerah tingkat II. Retribusi ini merupakan harga dan suatu pelayanan langsung (cost recovery) dari pemerintah daerah. Tentu saja dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanannya yang harus baik dan perlu ditingkatkan sesuai dengan besarnya retribusi yang ditarik (Widjaya,1998).

Soenarso (1994) menyatakan bahwa, retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Adapun retribusi daerah adalah suatu pembayaran yang dilakukan di daerah karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan.

Menurut Kaho (2001), ciri - ciri mendasar dari retribusi adalah : (a) retribusi dipungut oleh negara, (b) dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis, (c) adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, (d) retribusi dikenakan pada setiap orang / badan yang menggunakan/ mengenyam jasa - jasa yang disediakan negara.

Untuk mendapatkan surat keterangan pengeluaran keluar daerah maka setiap ternak harus dilengkapi :

- (1) Kartu milik ternak (perubahan pemilikan ternak dan cap ternak).
- (2) Surat perjanjian jual beli.
- (3) Tanda bukti pembayaran biaya pemeriksaan dan penyuntikan
(Anonim,1991).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain - lain usaha daerah yang sah. Pajak daerah adalah kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Kunarjo,1996).

Kaho (2001) menyatakan, sumber pendapatan daerah adalah :

- (a). Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri dari ;
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil perusahaan daerah
 4. lain-lain usaha daerah yang sah
- (b). Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari;
 1. Sumbangan dari pemerintah
 2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

(c) Lain-lain pendapatan yang sah

Jadi pendapatan daerah dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu ;

1. Pendapatan asli daerah
2. Pendapatan non asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan keberhasilan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya (Widjaya, 1998).

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- (a) Hasil pajak daerah
- (b) Hasil retribusi daerah
- (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- (d) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Anonim,1999)

Pinjaman Daerah

Penerimaan daerah dari pinjaman, digunakan untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Ada 6 sumber utama pinjaman yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah di Indonesia yaitu :

1. Pinjaman luar negeri untuk proyek – proyek pengembangan kota.
2. Pinjaman yang dinamakan rekening investasi untuk pengembangan usaha milik daerah.
3. Pinjaman yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penyertaan modal daerah.
4. Pinjaman dari pemerintah pusat guna pembangunan pasar program inpres pasar untuk kepentingan masyarakat yang berpendapatan rendah dan pedagang kecil.
5. Program pemerintah pusat dalam bentuk uang muka Ipeda.
6. Pemerintah daerah dapat meminjam dari bank dan pihak swasta lainnya (Soenarso, 1994).

Menurut Santoso (1981), apabila persediaan uang pinjaman cukup, maka pemerintah dapat meningkatkan pembangunannya dimana mengadakan perencanaan pensanaman modal dengan baik, sehingga tidak terjadi pemborosan atau banyaknya dana – dana yang tidak digunakan secara efisien.

Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya, sedang untuk pinjaman dari sumber luar



negeri harus melalui pemerintah pusat. Lanjut dari itu daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Sedangkan pinjaman jangka pendek digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah (Anonim,1999).

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari tanggal 2 April sampai dengan 2 Juni 2001, bertempat di Kabupaten Luwu.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode Studi Kasus (Case Study) dimana data yang diperoleh berasal dari kantor Dinas Peternakan berupa sub sektor peternakan, Kantor Dinas Pendapatan Daerah berupa laporan realisasi dan target penerimaan pajak dan retribusi daerah serta Kantor Dinas Statistik berupa data keadaan wilayah secara umum dan penduduk.

Analisis Data

Untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi sektor peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan pajak dan retribusi sektor peternakan}}{\text{Total pendapatan asli daerah}} \times 100\% \text{ (Asri, 1991)}$$

Untuk melihat besar kecilnya sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan maka nilai diperoleh akan dibandingkan dengan sumbangan dari sektor lain terhadap PAD, dengan kriteria sebagai berikut :

- Kontribusi pajak dan retribusi sektor peternakan besar jika berada di atas nilai rata-rata kontribusi dari sektor lain.
- Kontribusi pajak dan retribusi sektor peternakan sedang jika sama dengan nilai rata-rata kontribusi sektor lain.

- Kontribusi pajak dan retribusi sektor peternakan kecil apabila di bawah rata-rata kontribusi lain.

Konsep Operasional

Sebagai landasan penelitian maka terdapat sejumlah pengertian sebagai berikut :

- Kontribusi adalah besarnya nilai sumbangan pajak dan retribusi sektor peternakan terhadap total pendapatan asli daerah yang dinyatakan dalam persentase.
- Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Wajib pajak/retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak/retribusi terutang.
- Pendapatan asli daerah adalah keuangan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri melalui pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah.

KEDAAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Letak Geografis

Kabupaten Luwu yang beribukota Palopo merupakan salah satu dari dua puluh empat kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah sebesar 3.247,77 km², dan letaknya kurang lebih 400 km ke arah utara Kotamadya Makassar ibu kota Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan daerah – daerah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang.
- Sebelah Timur : Kabupaten Bone dan Propinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Mamuju.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Luwu terbagi habis dalam 11 kecamatan defemit, dan 5 kecamatan perwakilan. Disamping itu terdiri dari 179 desa definitif, 20 desa persiapan dan 16 kelurahan ditambah dengan 1 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Luwu, 2000

No.	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Persentase (%)
1.	Larompong	225,25	6,94
2.	Larompong Selatan	131,00	4,03
3.	Suli	235,25	7,24
4.	Belopa	146,43	4,51
5.	Bajo	134,82	4,15
6.	Bastem	301,00	9,27
7.	Latimojong	467,75	14,40
8.	Bus Pourang	182,67	5,62
9.	Ponrang	207,07	6,38
10.	Bua	204,01	6,28
11.	Walenrang	259,26	7,98
12.	Lamasi	505,74	15,57
13.	Wara	66,90	2,06
14.	Wara Selatan	40,64	1,26
15.	Wara Utara	26,56	0,82
16.	Tellu Wanua	113,42	3,49
	Jumlah	3247,77	100,00

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2000



Dari tabel diatas terlihat bahwa, dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, Kecamatan Lamasi mempunyai wilayah yang yang paling luas yaitu 505,74 km² atau 15,57 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu, sedangkan yang terkecil yaitu Kecamatan Wara Utara dengan luas wilayah 26,56 km² atau 0,82 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Luwu.

Kecamatan Perwakilan Larompang Selatan yang beribukotakan di Desa Bone Pute adalah Kecamatan terjauh dari ibu kota Kabupaten Luwu dengan jarak sekitar 80 km ke arah selatan Kota Palopo, sedangkan kecamatan terjauh yang terletak di sebelah utara Kota Palopo adalah Kecamatan Lamasi yang berjarak sekitar 30 km dari kota Palopo. Kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Luwu yaitu Kecamatan Bua dan Kecamatan Walenrang dengan jarak masing – masing dari Kota Palopo adalah sekitar 12 km arah selatan dan 21 km arah utara.

Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Luwu berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2000 berjumlah 397.522 jiwa, terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 197.151 jiwa (49,59 %) dan penduduk perempuan sebanyak 200.371 jiwa (50,41%). Perbandingan antara penduduk laki – laki terhadap penduduk perempuan (sex ratio) adalah 98 yang berarti sekitar 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki – laki. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk Kabupaten Luwu, dapat di lihat pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Kepadatan, Jenis Kelamin, dan Perbandingan Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu, 2000.

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Larompong	7.819	8.200	16.019	95	71
2.	Larompong Selatan	7.477	7.467	14.944	100	114
3.	Suli	11.321	11.869	23.190	95	99
4.	Belopa	14.526	15.412	29.938	94	204
5.	Bajo	9.676	10.069	19.745	96	146
6.	Bastem	5.461	5.288	10.749	103	36
7.	Latimojong	2.480	2.412	4.892	103	10
8.	Bua Ponrang	7.756	7.535	15.291	98	84
9.	Ponrang	21.935	22.439	44.374	98	214
10.	Bua	11.208	11.669	22.877	96	112
11.	Walenrang	18.598	18.248	36.846	102	142
12.	Lamasi	22.846	22.761	45.607	100	90
13.	Wara	25.076	25.272	50.348	99	753
14.	Wara Selatan	4.615	4.911	9.526	94	234
15.	Wara Utara	20.377	20.996	41.373	97	1558
16.	Tellu Wanua	5.980	5.823	11.803	103	104
	Jumlah	197.151	200.371	397.522	98	122

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2000.

Penduduk Kabupaten Luwu yang berjumlah 397.522 jiwa tersebar di 16 kecamatan atau menyebar di 179 desa definitif, 20 desa persiapan dan 16 kelurahan. Jika ditinjau dari segi kepadatan penduduk yang diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, maka terlihat bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2000 adalah rata - rata 122 jiwa per km², lebih besar dari kepadatan penduduk tahun 1999 yaitu rata - rata 118 jiwa per km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu tersebut masih relatif rendah. Namun demikian ada kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kecamatan yang terpadat penduduknya di Kabupaten Luwu yaitu Kecamatan Wara Utara dengan angka kepadatan rata - rata 1558 jiwa per km².

Banyaknya penduduk di Kecamatan Wara Utara dikarenakan, kecamatan tersebut merupakan wilayah Kota Administratif Palopo sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Luwu, yang merupakan tempat berkumpulnya penduduk dari berbagai daerah. Selanjutnya kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Latimojong yaitu 4892 jiwa dengan kepadatan rata - rata 10 jiwa per km².

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa perbedaan angka kepadatan penduduk antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya cukup besar. Hal ini perlu perhatian dalam rangka mengusahakan dan melaksanakan pembangunan yang merata pada setiap kecamatan terutama sarana transportasi.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kemajuan suatu daerah, sebab pendidikan adalah salah satu program pokok pemerintah dalam pembangunan nasional . Untuk memajukan suatu masyarakat perlu untuk membekali dengan ilmu pengetahuan. Kabupaten Luwu yang berpenduduk 397,522 jiwa, tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Luwu,2000.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	Tidak Berpendidikan	12.115	3,94
2.	SD / Sederajat	52.052	13,09
3.	SLTP / Sederajat	100.104	25,18
4.	SLTA / Sederajat	146.126	36,76
5.	Perguruan Tinggi	87.125	21,03
	Jumlah	397.522	100.00

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2000.

Dari Tabel 3 di atas, terlihat bahwa penduduk Kabupaten Luwu masih ada 12,155 jiwa yang tidak berpendidikan atau masih 3,94 % dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Luwu. Sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar 87.125 jiwa atau sebesar 21,03 % dari jumlah penduduk. Tingkat pendidikan sekolah dasar sebanyak 52.052 jiwa Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama sebanyak 100,104 jiwa dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 146.126 jiwa atau 36,76 % dari jumlah penduduk.

Dengan demikian tingkat pendidikan di Kabupaten Luwu cukup mengalami kemajuan dimana terlihat penduduk yang tidak berpendidikan sisa 3.194 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Luwu.

Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Luwu pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh potensi daerah yang subur yang cocok untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Di samping itu sebahagian kecil penduduk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI serta pegawai swasta. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Luwu, 2000

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (KK)	Prosentase (%)
1.	Petani	51.252	87,42
2.	PNS dan ABRI	5.631	9,62
3.	Pegawai Swasta	1.741	2,96
	Jumlah	58.624	100,00

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2000

Dari Tabel 4, terlihat bahwa jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 51.252 kepala keluarga atau 87,42 % dari keseluruhan

kepala keluarga, Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sebanyak 5631 kepala keluarga atau 9,62 % dari keseluruhan kepala keluarga dan pegawai swasta sebanyak 1741 atau 2,96 % dari keseluruhan kepala keluarga.

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa dalam sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani akan mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Untuk mewujudkan semua itu, diperlukan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung kesehatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini :

No.	Sarana	Jumlah (buah)
1.	Rumah Sakit Umum	1
2.	Rumah Sakit Khusus	1
3.	Rumah Bersalin	1
	Jumlah	3

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2000

Dari Tabel 5 terlihat bahwa sarana kesehatan khususnya rumah sakit masih tergolong kurang, sehingga masih perlu ditambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Sedangkan tenaga kesehatan menurut jenisnya dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6. Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Luwu, 2000

No.	Jenis Tenaga Profesional	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Dokter Umum	23	4
2.	Dokter Gigi	6	1,04
3.	Dokter Ahli	10	1,75
4.	Paramedis	276	48,08
5.	Bidan	207	36,07
6.	Tenaga Kesehatan Lain	52	9,06
	Jumlah	574	100,00

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2000

Pada Tabel 6 terlihat, jika dibandingkan dengan jumlah sarana kesehatan maka jumlah tenaga kesehatan lebih memadai. Tenaga kesehatan ini sebagai tenaga operasional di lapangan diharapkan mampu melayani masyarakat dengan baik, sehingga tercipta suatu masyarakat yang sehat yang dapat mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Keadaan Peternakan

Sebagaimana halnya dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, penduduk Kabupaten Luwu sebagian besar hidup sebagai petani, dalam arti bertani secara umum yaitu sebagai petani yang bekerja di sawah dan kebun dan peternak. Sebagai peternak mereka memelihara sapi, kerbau, kambing, babi, ayam dan itik. Untuk jelasnya mengenai berbagai jenis ternak yang dipelihara penduduk di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini :



Tabel 7. Populasi Ternak di Kabupaten Luwu Tahun 2000.

No.	Jenis ternak	Jumlah (ekor)	Prosentase
1.	Sapi	11.480	0,98
2.	Kerbau	5.347	0,46
3.	Kambing	8.530	0,73
4.	Kuda	480	0,04
5.	Babi	5.765	0,49
6.	Ayam Buras	1.082.950	92,88
7.	Itik	51.250	4,42
	Jumlah	1.165.802	100,00

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2000

Dari Tabel 7, terlihat bahwa ternak yang banyak di pelihara penduduk di Kabupaten Luwu adalah ternak unggas dalam hal ini ayam buras dan itik dengan prosentase masing-masing 92,88 % dan 4,42 % dari keseluruhan jumlah jenis ternak. Banyaknya populasi ayam buras ini karena hampir setiap rumah tangga memelihara ayam buras, meskipun hanya sebagai pekerjaan sampingan dan belum dipelihara secara intensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan menggali keuangan sendiri, sehingga dapat memperkecil ketergantungan dari pemerintah pusat

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran kabupaten ini menjadi dua kabupaten pada tahun 1999 juga berimbas kepada penerimaan sumber keuangan daerah. Walau demikian pemerintah Kabupaten Luwu terus memaksimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah dari sumber keuangan lain untuk membiayai pembangunan dan belanja daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah bersumber dari sektor peternakan. Sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari sektor ini adalah pajak potong hewan, retribusi rumah potong hewan dan retribusi biaya pemeriksaan dan pembantaian.

Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan yang Dikelola di Kabupaten Luwu

Pajak dan retribusi sub sektor peternakan yang dikelola di Kabupaten Luwu, antara lain :

1. Pajak Potong Hewan

Pajak potong hewan ini diatur dalam perda Nomor 5 tahun 1993. Besarnya tarif pajak potong hewan dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini :

Tabel 8. Tarif Pajak Potong Hewan di Kabupaten Luwu, 2000.

No.	Jenis Ternak (ekor)	Jenis Pajak Potong Hewan		
		Potong Usaha (Rp)	Potong Hajat (Rp)	Potong Darurat (Rp)
1.	Sapi / Kerbau	10.000	5.000	3.000
2.	Babi	10.000	7.500	7.500
3.	Kambing	1.000	1.000	500

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, 2000

Adapun pelanggaran dari peraturan di atas dikenakan denda sebesar Rp 50.000 atau pidana kurungan selama tiga (3) bulan.

2. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)

Peraturan mengenai retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 1993 dengan besarnya retribusi sebagai berikut :

- a. Kerbau 10.000 per ekor
- b. Sapi 10.000 per ekor
- c. Kambing 2500 per ekor

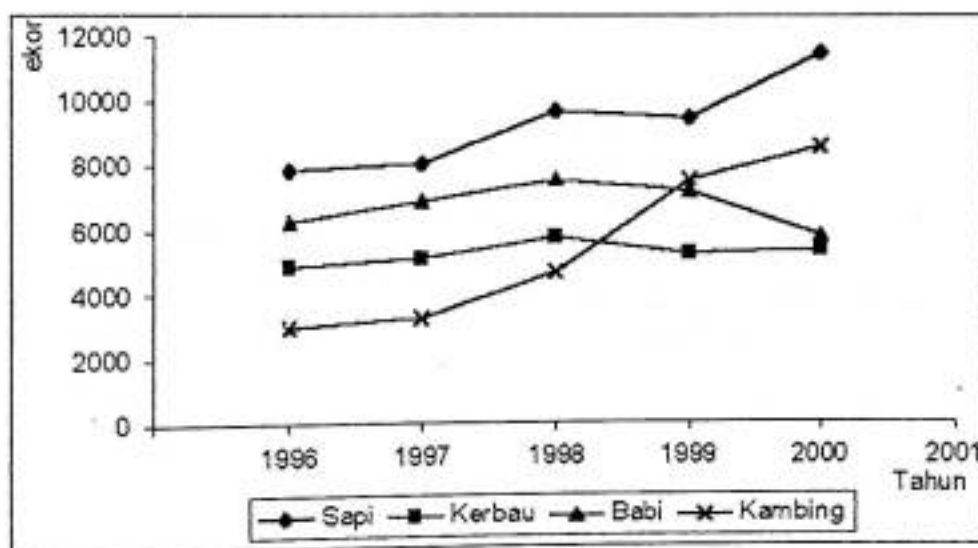
Pelanggaran atas Perda di atas maka dikenakan denda sebesar Rp 50.000 atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

3. Retribusi Biaya Pemeriksaan dan Biaya Penyuntikan

Besarnya retribusi biaya pemeriksaan dan penyuntikan yaitu : sapi / kerbau Rp 10.000 per ekor, kambing Rp 2500 per ekor. Hal ini diatur oleh Perda nomor 8 tahun 1994. Adapun pelanggaran atas Perda diatas dapat dikenakan denda sebesar RP 50.000 atau pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan.

Potensi Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa populasi ternak khususnya ternak sapi, kerbau dan babi mengalami penurunan pada tahun 1999. Kecenderungan penurunan populasi ternak tersebut disebabkan oleh banyaknya pemotongan ternak dan pemekaran wilayah Kabupaten Luwu menjadi dua kabupaten. Sedangkan populasi ternak kambing menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu

Penerimaan pajak dan retribusi dari sub sektor peternakan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Penerimaan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Luwu, 2000.

No	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan	Tahun				
		1996	1997	1998	1999	2000
1.	Pajak Potong Hewan	27.635.000	34.937.100	38.846.730		
2.	Pemeriksaan / Pembantaian	41.317.000	96.310.000	90.972.000	95.782.500	90.082.050
3.	Pendaftaran Ulang Binatang Ternak	8.026.000	11.750.500	18.089.500		
4.	Retribusi RPH			14.550.000	14.114.500	34.267.000
	Total	76.978.000	142.997.600	162.458.230	109.897.000	124.349.050

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, 2000

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan pajak dan retribusi dari sub sektor peternakan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, namun pada Tahun 1999 mengalami penurunan seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur jenis pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pemberlakuan undang-undang tersebut mengakibatkan adanya penghapusan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah termasuk pajak potong hewan pada sub sektor peternakan.



Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan

Pemerintah daerah telah menargetkan jumlah penerimaan pajak dan retribusi untuk tiap sektor setiap tahunnya. Begitu pula halnya dengan sub sektor peternakan. Namun terkadang jumlahnya yang telah ditargetkan tidak dapat dicapai atau direalisasikan.

Adapun target dan realisasi pajak dan retribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Luwu, 2000.

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%) Penerimaan
1.	1996	196.860.000	76.978.000	39,1
2.	1997	180.410.000	142.997.600	79,26
3.	1998	184.515.000	162.458.230	88,05
4.	1999	161.314.000	109.897.000	68,13
5.	2000	165.250.000	124.349.050	75,25

Sumber : Kantor Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, 2000

Pada Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya tidak pernah tercapai, meskipun di sisi lain penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan mengalami peningkatan. Target yang tidak tercapai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dan seringnya terjadi spekulasi dalam pemungutan pajak dan retribusi oleh petugas pajak di lapangan. Menurut

Suaib (Dinas Peternakan Luwu) bahwa kebanyakan wajib pajak sering menghindar dari petugas pajak untuk tidak dikenakan pajak dan biasanya melakukan pemotongan ternak secara sembunyi. Disamping itu, adanya manipulasi administrasi atau pelaporan mengenai jumlah pemotongan ternak yang dilakukan oleh pelaksana teknis pajak di lapangan.

Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Terhadap Total PAD di Kabupaten Luwu.

Adapun besarnya kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Luwu.

No.	Tahun	Total Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain (Rp)	Rata-rata Kontribusi Sub Sektor Peternakan	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan (Rp)	Rata-rata Kontribusi Sub Sektor Peternakan (%)
1.	1996	4.455.654.272	4.378.675.672	3,07	76.978.000	1,73
2.	1997	6.611.112.703	6.468.115.103	3,06	142.997.600	2,16
3.	1998	3.470.307.811	3.308.049.581	5,02	162.458.230	4,68
4.	1999	5.773.379.874	5.663.482.874	5,16	109.897.000	1,91
5.	2000	2.891.696.078	2.767.347.028	5,04	124.349.050	4,3

Sumber : Data yang Telah Diolah, 2000.

Sedangkan besarnya kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini :

Tabel 12. Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Total PAD di Kabupaten Luwu.

No.	Tahun	Total Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain (Rp)	Rata-rata Kontribusi Sub Sektor Peternakan	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan (Rp)	Rata-rata Kontribusi Sub Sektor Peternakan (%)
1.	1996	5.070.316.374	4.378.675.672	2,7	76.978.000	1,52
2.	1997	7.132.764.787	6.468.115.103	2,83	142.997.600	2,04
3.	1998	4.668.992.300	3.308.049.581	3,73	162.458.230	3,48
4.	1999	6.656.736.987	5.663.482.874	4,48	109.897.000	1,65
5.	2000	3.509.817.803	2.767.347.028	4,15	124.349.050	3,54

Sumber : Data yang Telah Diolah, 2000.

Dari Tabel 11 dan 12 di atas menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan, baik terhadap Total Pajak dan Retribusi Daerah maupun terhadap Total PAD, tergolong kecil karena berada di bawah nilai rata-rata kontribusi sub sektor lain. Namun jika dilihat dari jumlah penerimaan, pajak dan retribusi sub sektor peternakan terus mengalami peningkatan kecuali pada Tahun 1999, terjadi penurunan. Penurunan jumlah penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan tersebut disebabkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur jenis pajak Propinsi dan jenis pajak Kabupaten. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut mengakibatkan beberapa pajak dan retribusi yang dihapus termasuk pajak potong hewan dari sub sektor peternakan. Adapun jenis pajak yang

diperkenankan untuk dipungut berdasarkan Undang-undang No.18 tersebut sebagai berikut :

1. Pajak hotel dan restoran
2. Pajak hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Pemasangan jalan
5. Pajak pengambilan dan Pengolahan batuan galian golongan "C"
6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total PAD Kabupaten Luwu selama 5 tahun terakhir masih relatif kecil karena berada di bawah nilai rata-rata kontribusi sub sektor lain. Kontribusi sub sektor peternakan yang tergolong kecil tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dan seringnya terjadi spekulasi dalam pemungutan pajak dan retribusi oleh petugas pajak di lapangan.

Saran

Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Dinas Pendapatan Daerah serta dukungan dari masyarakat agar pajak dan retribusi sub sektor peternakan sebagai sumber PAD dapat lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1997. Kontribusi pajak dan retribusi hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Tator, Ujung Pandang.
- Anonim, 1999. Penjelasan atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Biro Bina Otonomi Daerah Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- _____, 1999. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Biro Bina Otonomi Daerah Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- Bohari, 1985. Pengantar Perpajakan. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Brotodihardjo, R.S. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT. Eresco, Cetakan ke lima belas, Bandung.
- Devas, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Kaho, YR, 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2001.
- Komaruddin, 1988. Pengantar Perencanaan dan Kebijakan Ekonomi, Penerbit Alumni Bandung.
- Kunarjo, 1996. Perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Edisi ke-3. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Kustiah, 1988. Kemungkinan Pengembangan Peternakan Sapi Rakyat di Sulawesi Selatan. LPUH. Ujung Pandang.
- Mardiasmo, 1997. Perpajakan. Andi Offset, Yogyakarta.
- Pamudji, S, 1980. Pembinaan Perkotaan di Indonesia. Ichtar, Jakarta.
- Prawiro Kusumo, 1990. Ilmu Usaha Tani. Edisi I BPFE. Anggota IKAPI UGM, Yogyakarta.

- Rasyaf, 1996. Memasarkan Hasil Peternakan. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Santoso, 1981. Pengantar Ilmu Pajak. PT. Eresco, Jakarta.
- Soedargo, 1994. Perpajakan dan Retribusi Daerah. Penerbit NV.Eresco, Bandung.
- Soemitro, R, 1990. Pokok - Pokok Perpajakan. Liberty, Yogyakarta.
- Soenarso, SM, 1994. Kemandirian Pembiayaan Pembangunan. Seni Kajian Fiskal dan Moneter PT. Bina Reka Pariwisata, Jakarta.
- Sostroamidjoyo, S.M, 1990. Peternakan Umum CV. Yasaguna, Jakarta.
- Waluyo, 1997. Ketentuan Undang - Undang Baru di Bidang Perpajakan. LPFE UI, Jakarta.
- Widjaya, AW, 1998. Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II. PT. Rajafindo Persada, Jakarta.

Lampiran 1. Populasi Ternak di Kabupaten Luwu (1996 - 2000).

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		1996 (ekor)	1997 (ekor)	1998 (ekor)	1999 (ekor)	2000 (ekor)
1.	Sapi	7.850	8.051	9.690	9.460	11.480
2.	Kerbau	4.832	5.082	5.730	5.220	5.347
3.	Kambing	2.950	3.250	4.670	7.520	8.530
4.	Kuda	448	451	457	469	480
5.	Babi	6.234	6.850	755	7170	765
6.	Ayam Buras	1.010.750	1.019.680	1.049.140	1.066.080	1.082.950
7.	Itik	54.115	55.310	56.125	57.190	51.250

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Luwu, 2000

Lampiran 2. Pemotongan Ternak di Kabupaten Luwu (1996 - 2000).

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		1996 (ekor)	1997 (ekor)	1998 (ekor)	1999 (ekor)	2000 (ekor)
1.	Sapi	1.190	1.307	1.950	2.077	3.018
2.	Kerbau	851	913	437	998	1.119
3.	Kambing	238	254	375	312	320
4.	Kuda	-	-	-	-	-
5.	Babi	871	965	980	941	950
6.	Ayam Buras	798.24	800.116	843.225	852.684	800.117
7.	Itik	28.228	29.015	38.112	34.314	28310

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Luwu, 2000



Lampiran 3. Sarana dan Prasarana Penunjang.

No.	Uraian	Volume	Keterangan
1.	RPH	8 unit	
2.	Pos IB	1 unit	Inseminator
3.	Pos Keswan	1 unit	Dokter Hewan, tenaga medis
4.	Mini Ranch	10 ha	Karetan, Kec. Walunrang
5.	Kinak	5 ha	Karang-karangan Kec. Bua

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Luwu

Lampiran 4. Penerimaan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Luwu (1996 - 2000).

No.	Pajak / Retribusi	Tahun				
		1996 (Rp)	1997 (Rp)	1998 (Rp)	1999 (Rp)	2000 (Rp)
1.	Pajak Potong Hewan	27.635.000	34.937.100	38.846.730		
2.	Pemeriksaan / Pembantaian	41.317.000	96.310.000	90.972.000	95.782.500	90.082.050
3.	Pendaftaran Ulang	8.026.000	11.750.500	14.550.000		
4.	Retribusi RPH			18.089.500	14.114.500	34.267.000
	Total	76.978.000	142.997.600	162.458.230	109.897.000	124.349.050

Sumber : Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Luwu, 2000

Lampiran 5. Perhitungan Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Lain terhadap Total Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu

1. Tahun 1996 / 1997

(a). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan:

Pajak Daerah	=	544.606.549
Retribusi Daerah	=	3.911.047.723
Total	=	4.455.654.272

No.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak Potong Hewan	27.635.000
2.	Pemeriksaan / Pembantaian	41.317.000
3.	Pendaftaran Ulang Binatang ternak	8.026.000
	Total	76.978.000

Share Pajak dan retribusi sub sektor Peternakan

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}}{\text{Total Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

$$= \frac{76.978.000}{4.455.654.272} \times 100 \%$$

$$= 1,73 \%$$

- (b). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain terhadap Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak Pembangunan I	76.442.725
2.	Pajak Bangsa Asing	1.870.000
3.	Pajak Tontonan	4.779.000
4.	Pajak Reklame	13.820.944
5.	Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	6.603.750
6.	Pajak Penerangan Jalan	413.455.130
	Total	516.971.549

No.	Retribusi Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Uang Leges	48.873.000
2.	Uang Dispensasi Jalan dan Jembatan	40.531.800
3.	Uang Pangkalan	2.007.747.500
4.	Sewa Tanah Bangunan	108.085.620
5.	Izin Mendirikan Bagunan	140.308.546
6.	Pelelangan Ikan	10.266.000
7.	Stasiun Bus dan Taksi (TPR)	242.154.500
8.	Rumah Sakit dan Balia Pengobatan	464.868.845
9.	Tempat Rekreasi	3.001.600
10.	Retribusi Pasar	507.686.600
11.	Izin Tempat Usaha	44.820.000
12.	Bea Susung Pelabuhan	1.285.000
13.	Retribusi Parkir	19.589.500
14.	Kebersihan	72.269.400
15.	Izin Pentupan Jalan	229.000
16.	Pemberian izin Trayek	13.337.500
17.	Retribusi Huller	7.119.000
18.	Sewa Alat-Alat Berat	14.275.000
19.	Uang KTP dan Penomoran Rumah / Bangunan	10.000.000
20.	Pemeriksaan Mutu Ikan	-
21.	Sewa Mobil Jenazah	420.000
22.	Sewa Pelataran	11.180.712
23.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin	22.230.000
21.	Izin Dokumen Tender	70.185.000
22.	Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol	1.200.000
23.	Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor	-
	Total	3.861.704.123

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\text{Total Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100 \% \\ &= \frac{\text{Rp } 516.971.549 + \text{Rp } 3.861.704.123}{4.455.654.272} \times 100 \% \\ &= 98,27 \% \end{aligned}$$

Rata-rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\text{Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\text{Total Pajak dan Total Retribusi Sub sektor Lain}} \\ &= \frac{98,27}{(6 + 26)} \\ &= 3,07 \% \end{aligned}$$

2. Tahun 1997 / 1998

(a). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan:

Pajak Daerah	=	697.915.706
Retribusi Daerah	=	5.913.196.997
Total	=	6.611.112.703

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak Potong Hewan	34.937.100
2.	Pemeriksaan / Pembantaian	96.310.000
3.	Pendaftaran Ulang Binatang ternak	11.750.500
	Total	142.997.600

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}}{\text{Total Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100 \% \\ &= \frac{142.997.600}{6.611.112.703} \times 100 \% \\ &= 2,16 \% \end{aligned}$$

- (b). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain terhadap Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak Pembangunan I	90.479.130
2.	Pajak Bangsa Asing	7.415.000
3.	Pajak Tontonan	1.545.550
4.	Pajak Reklame	18.633.396
5.	Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	7.499.125
6.	Pajak Penerangan Jalan	537.406.405
	Total	662.978.606

No.	Retribusi Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Uang Leges	62.828.250
2.	Uang Dispensasi Jalan dan Jembatan	55.193.900
3.	Uang Pangkalan	3.312.840.605
4.	Sewa Tanah Bangunan	99.371.120
5.	Izin Mendirikan Bangunan	211.672.221
6.	Pelelangan Ikan	12.245.800
7.	Stasiun Bus dan Taksi (TPR)	261.026.600
8.	Rumah Sakit dan Balia Pengobatan	611.747.751
9.	Tempat Rekreasi	9.808.600
10.	Retribusi Pasar	690.134.050
11.	Izin Tempat Usaha	61.796.000
12.	Bea Susung Pelabuhan	1.109.000
13.	Retribusi Parkir	13.193.250
14.	Kebersihan	102.096.300
15.	Izin Pentupan Jalan	997.000
16.	Pemberian izin Trayek	12.782.500
17.	Retribusi Huller	7.318.000
18.	Sewa Alat-Alat Berat	20.255.250
19.	Uang KTP dan Penomoran Rumah / Bangunan	20.000.000
20.	Pemeriksaan Mutu Ikan	8.802.400
21.	Sewa Mobil Jenazah	270.000
22.	Sewa Pelataran	29.062.900
23.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin	22.830.000
21.	Izin Dokumen Tender	122.425.000
22.	Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol	-
23.	Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor	55.330.000
	Total	5.805.136.497

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\text{Total Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100 \% \\ &= \frac{\text{Rp } 662.978.606 + 5.805.136.497}{6.611.112.703} \times 100 \% \\ &= 97,84 \% \end{aligned}$$

Rata-rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\text{Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\text{Total Pajak dan Total Retribusi Sub Sektor Lain}} \\ &= \frac{97,84}{(6 + 26)} \\ &= 3,06 \% \end{aligned}$$

3. Tahun 1998 / 1999

(a). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan:

Pajak Daerah	= 932.400.384
Retribusi Daerah	= 2.537.907.427
Total	= 3.470.307.811

No.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak Potong Hewan	38.846.730
2.	Pemeriksaan / Pembantaian	90.972.000
3.	Retribusi RPH	18.089.500
4.	Pendaftaran Ulang Binatang Ternak	14.550.000
	Total	162.458.230



Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}}{\text{Total Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{162.458.230}{3.470.307.811} \times 100\%$$

$$= 4,68\%$$

- (b). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain terhadap Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak Hotel dan Restoran	94.901.150
2.	Pajak Hiburan	325.000
3.	Pajak Reklame	16.273.800
4.	Pajak Pemasangan Jalan	661.366.223
5.	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Batuan galian Golongan "C"	120.887.481
6.	Pajak Pemanfaatan air Bawah tanah dan air permukaan	-
	Total	893.753.654

No.	Retribusi Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pelayanan Kesehatan	871.089.041
2.	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	84.983.200
3.	Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	30.990.000
4.	Pasar	778.764.100
5.	Pemakaian Kekayaan Daerah	204.229.920
6.	Pasar Grosir atau Pertokoan	15.672.900
7.	Terminal	268.010.300
8.	Tempat Khusus Parkir	13.859.850
9.	Tempat Rekreasi dan Olah Raga	3.067.000
10.	IMB	124.958.116
11.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-
12.	Izin Gangguan (Ho)	4.197.000
13.	Izin Trayek	14.474.500
	Total	2.414.295.927

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\begin{aligned}
 \text{Share} &= \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\text{Total Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Rp } 893.753.654 + 2.414.295.927}{3.470.307.811} \times 100 \% \\
 &= 95,32 \%
 \end{aligned}$$

Rata-rata Share Pajak dan Retribusi Sektor Lain

$$\begin{aligned}
 \bar{X} &= \frac{\text{Share Pajak dan Retribusi Sektor Lain}}{\text{Total Pajak dan Total Retribusi Sektor Lain}} \\
 &= \frac{95,32}{(6 + 13)} \\
 &= 5,02 \%
 \end{aligned}$$



4. Tahun 1999/ 2000

(a). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan:

Pajak Daerah	=	2.780.016.971
Retribusi Daerah	=	2.993.362.903
Total	=	5.773.379.874

No.	Retribusi Sub Sektor Peternakan	Penerimaan (Rp)
1.	Pemeriksaan / Pembantaian	95.782.500
2.	Retribusi RPH	14.114.500
	Total	109.897.000

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}}{\text{Total Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

$$= \frac{109.897.000}{5.773.379.874} \times 100 \%$$

$$= 1,91 \%$$

(b). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain terhadap Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak Hotel dan Restoran	127.909.550
2.	Pajak Hiburan	3.150.000
3.	Pajak Reklame	25.634.600
4.	Pajak Pemasangan Jalan	1.171.218.632
5.	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Batuan Galian Golongan "C"	1.442.885.039
6.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	9.219.150
	Total	2.780.016.971

No.	Retribusi Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pelayanan Kesehatan	1.158.570.831
2.	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	105.691.140
3.	Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	31.032.000
4.	Pasar	806.638.750
5.	Pemakaian Kekayaan Daerah	344.171.450
6.	Pasar Grosir atau Pertokoan	2.812.600
7.	Terminal	250.949.500
8.	Tempat Khusus Parkir	15.612.500
9.	Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.202.500
10.	IMB	154.037.132
11.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	-
12.	Izin Gangguan (Ho)	2.440.000
13.	Izin Trayek	10.307.500
	Total	2.883.465.903

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\begin{aligned}
 \text{Share} &= \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\text{Total Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Rp } 2.780.016.071 + 2.883.465.903}{5.773.379.874} \times 100 \% \\
 &= 98,1 \%
 \end{aligned}$$

Rata-rata Share Pajak dan Retribusi Sektor Lain

$$\begin{aligned}
 \bar{X} &= \frac{\text{Share Pajak dan Retribusi Sektor Lain}}{\text{Total Pajak dan Total Retribusi Sektor Lain}} \\
 &= \frac{98,1}{(6+13)} \\
 &= 5,16 \%
 \end{aligned}$$

5. Tahun 2000

(a) Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan:

Pajak Daerah	=	761.272.815
Retribusi Daerah	=	2.130.423.263
Total	=	2.891.696.078

No.	Retribusi Sub Sektor Peternakan	Penerimaan (Rp)
1.	Pemeriksaan / Pembantaian	90.082.050
2.	Retribusi RPH	34.267.000
	Total	124.349.050

Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan}}{\text{Total Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100 \% \\ &= \frac{124.349.050}{2.891.696.078} \times 100 \% \\ &= 4,3 \% \end{aligned}$$

(b) Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain terhadap Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Pajak Daerah	Penerimaan (Rp)
		49.931.975
1.	Pajak Hotel dan Restoran	1.580.750
2.	Pajak Hiburan	32.759.050
3.	Pajak Reklame	518.162.736
4.	Pajak Pemasangan Jalan	130.752.296
5.	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Batuan galian Golongan "C"	28.086.008
6.	Pajak Pemanfaatan air Bawah tanah dan air permukaan	761.272.815
	Total	

No.	Retribusi Daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pelayanan Kesehatan	957.869.884
2.	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	25.131.000
3.	Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	18.117.000
4.	Pasar	289.729.395
5.	Pemakaian Kekayaan Daerah	53.006.650
6.	Pasar Grosir atau Pertokoan	10.540.000
7.	Terminal	126.929.800
8.	Tempat Khusus Parkir	5.129.000
9.	Tempat Rekreasi dan Olah Raga	833.000
10.	IMB	61.058.984
11.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	18.937.000
12.	Izin Gangguan (Ho)	10.513.500
13.	Izin Trayek	428.279.000
	Total	2.006.074.213

Share Pajak dan Retribusi Sektor Lain

$$\begin{aligned}
 \text{Share} &= \frac{\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sektor Lain}}{\text{Total Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Rp } 761.272.815 + 2.006.074.213}{2.891.696.078} \times 100 \% \\
 &= 95,7 \%
 \end{aligned}$$

Rata-rata Share Pajak dan Retribusi Sektor Lain

$$\begin{aligned}
 \bar{X} &= \frac{\text{Share Pajak dan Retribusi Sektor Lain}}{\text{Total Pajak dan Total Retribusi Sektor Lain}} \\
 &= \frac{95,7}{(6+13)} \\
 &= 5,04 \%
 \end{aligned}$$

Lampiran 6. Perhitungan Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Total PAD Di Kabupaten Luwu

1. Tahun 1996 / 1997

No.	Sumber PAD	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan	76.978.000
2.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain	4.378.675.672
3.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	129.963.459
4.	Penerimaan dinas-dinas	6.463.500
5.	Penerimaan lain-lain	478.235.743
	Total	5.070.316.374

(a). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan terhadap Total PAD

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan})}{(\text{Total PAD})} \times 100 \%$$

$$= \frac{76.978.000}{5.070.316.374} \times 100 \%$$

$$= 1,52 \%$$

(b). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain terhadap Total PAD

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain})}{(\text{Total PAD})} \times 100 \%$$

$$= \frac{4.378.675.672}{5.070.316.374} \times 100 \%$$

$$= 86,36 \%$$

Rata-rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\bar{X} = \frac{\text{Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\sum \text{Pajak} + \sum \text{Retribusi}}$$

$$= \frac{86,36}{(6 + 26)} = 2,7 \%$$

2. Tahun 1997/1998

No.	Sumber PAD	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan	142.997.600
2.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain	6.468.115.103
3.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	.
4.	Penerimaan dinas-dinas	15.419.500
5.	Penerimaan lain-lain	506.232.584
	Total	7.132.764.787

(a). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan terhadap Total PAD

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan})}{(\text{Total PAD})} \times 100\%$$

$$= \frac{142.997.600}{7.132.764.787} \times 100\%$$

$$= 2,04\%$$

(b). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain terhadap Total PAD

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain})}{(\text{Total PAD})} \times 100\%$$

$$= \frac{6.468.115.103}{7.132.764.787} \times 100\%$$

$$= 90,7\%$$

Rata-rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\bar{X} = \frac{\text{Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\sum \text{Pajak} + \sum \text{Retribusi}}$$

$$= \frac{90,7}{(6 + 26)} = 2,83\%$$

3. Tahun 1998 / 1999

No.	Sumber PAD	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan	162.458.230
2.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain	3.308.049.581
3.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	578.447.033
4.	Penerimaan lain-lain	619.791.110
	Total	4.668.745.954

(a). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan terhadap Total PAD

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan})}{(\text{Total PAD})} \times 100 \% \\ &= \frac{162.458.230}{4.668.745.954} \times 100 \% \\ &= 3,48 \% \end{aligned}$$

(b). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain terhadap Total PAD

$$\begin{aligned} \text{Share} &= \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain})}{(\text{Total PAD})} \times 100 \% \\ &= \frac{3.308.295.927}{4.668.745.954} \times 100 \% \\ &= 70,86 \% \end{aligned}$$

Rata-rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\text{Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\sum \text{Pajak} + \sum \text{Retribusi}} \\ &= \frac{70,86}{(6+13)} = 3,73 \% \end{aligned}$$



4. Tahun 1999/ 2000

No.	Sumber PAD	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan	109.897.000
2.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain	5.663.482.874
3.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	342.104.970
4.	Penerimaan lain-lain	541.252.143
	Total	6.656.736.987

(a). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan terhadap Total PAD

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan})}{(\text{Total PAD})} \times 100 \%$$

$$= \frac{109.897.000}{6.656.736.987} \times 100 \%$$

$$= 1,65 \%$$

(b). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain terhadap Total PAD

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain})}{(\text{Total PAD})} \times 100 \%$$

$$= \frac{5.663.482.874}{6.656.736.987} \times 100 \%$$

$$= 85,08 \%$$

Rata-rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\bar{X} = \frac{\text{Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\sum \text{Pajak} + \sum \text{Retribusi}}$$

$$= \frac{85,06}{(6+13)}$$

$$= 4,48 \%$$

5. Tahun 2000

No.	Sumber PAD	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan	124.349.050
2.	Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain	2.767.347.028
3.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	-
4.	Penerimaan lain-lain	618.121.725
	Total	3.509.817.803

(a). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan terhadap Total PAD

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan})}{(\text{Total PAD})} \times 100 \%$$

$$= \frac{124.349.050}{3.509.817.803} \times 100 \%$$

$$= 3,54 \%$$

(b). Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain terhadap Total PAD

$$\text{Share} = \frac{(\text{Pendapatan Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain})}{(\text{Total PAD})} \times 100 \%$$

$$= \frac{2.767.347.028}{3.509.817.803} \times 100 \%$$

$$= 78,85 \%$$

Rata-rata Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain

$$\bar{X} = \frac{\text{Share Pajak dan Retribusi Sub Sektor Lain}}{\sum \text{Pajak} + \sum \text{Retribusi}}$$

$$= \frac{78,85}{(6+13)}$$

$$= 4,15 \%$$